

# J24022118050

*by* Fekon Uniga

---

**Submission date:** 21-Nov-2022 03:04AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1960158143

**File name:** azgia\_jurnal-1.docx (575.87K)

**Word count:** 3278

**Character count:** 21126

# **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GARUT**

**Azgia Permata Khoirunnisa<sup>1</sup>;Tinneke Hermina<sup>2</sup>;Wahyuningsih<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Garut

[24022118050@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022118050@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Garut

[TinnekeHermina@uniga.ac.id](mailto:TinnekeHermina@uniga.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Garut

[Wahyuningsih@uniga.ac.id](mailto:Wahyuningsih@uniga.ac.id)

## **Abstract**

"Analysis of the Effectiveness of Land and Building Tax Revenue in Garut Regency" is the title of this study. The purpose of this study is to find out how well the performance of land and building tax revenues in Garut Regency.

This research uses a descriptive qualitative approach. Library research and field research, which included interview and documentation, were used as data collection methods. Qualitative descriptive analysis was used as a data analysis method. Triangulation method used to validate data.

The findings show that the level of effectiveness of land and building tax revenue is included in the effective category in 2018 and 2019, quite effective in 2020, and effective in 2021.

**Keywords:** Effectiveness, Land and Building Tax Revenue

## **Abstrak**

"Analisis Efektivitas pendapatan PBB di Kabupaten Garut" menjadi judul penelitian ini. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja Pendapatan PBB di Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif kualitatif. teknik pengumpulan laporan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode analisis data. Triangulasi metode digunakan untuk menguji validitas data.

Has<sup>7</sup> temuan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori efektif pada tahun 2018 dan 2019, kategori cukup efektif pada tahun 2020, dan kategori efektif pada tahun 2021..

<sup>33</sup>  
**Kata Kunci:** Efektivitas, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

## <sup>21</sup> **1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, hukum, dan bentuk-bentuk pembangunan lainnya. Indonesia saat ini sedang giat meningkatkan pertumbuhannya; akibatnya, pemerintah harus mendistribusikan pembangunan secara merata.

Pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri untuk membiayai kegiatan rutin atau pembangunan daerah.<sup>2</sup> Akibatnya, pemerintah daerah harus mampu menghasilkan uang yang sebesar-besarnya. Salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>4</sup> Daerah pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap daerah untuk pem<sup>12</sup>gunaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak. Judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seba<sup>1</sup>pa baik kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memungut PBB. Sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan pedesaan semuanya termasuk dalam P<sup>2</sup>b. Setiap daerah memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar, khususnya PBB. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah, khususnya di Kabupaten Garut yang terbesar pajak bumi dan bangunannya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (BAPENDA), salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan PAD adalah pendapatan dari pajak bumi dan bangunan.

Kabupaten Garut memiliki banyak potensi salah satunya berasal dari sektor daerah yang pembangunannya mulai merata. Selain itu, Kabupaten Garut memiliki banyak industri dan mendirikan usaha baik besar maupun kecil. Selain itu per<sup>6</sup>ayar pajak di Kabupaten Garut juga banyak karena setiap orang wajib memiliki pos pajak bumi dan bangunan. Berikut data tentang tanah dan bangunan laporan penerimaan pajak dapat dilihat di Kabupaten Garut untuk informasi tambahan:

**Tabel 1.1**

**Anggaran dan Capaian Penerimaan PBB di Kabupaten Garut  
Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Selisih	
				(Rp)	(%)
1	2018	44.252.708.823	41.206.515.375	(3.046.193.448)	(7%)
2	2019	45.349.591.503	42.024.170.752	(3.325.420.751)	(7%)
3	2020	45.884.564.236	40.830.964.390	(5.053.599.846)	(11%)
4	2021	46.236.054.313	42.272.837.347	(3.963.216.966)	(8%)

Sumber: Data Laporan Realisasi Penerimaan PBB di BAPENDA Kab.Garut tahun 2021

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dilihat dari laporan anggaran dan capaian pendapatan PBB menunjukkan bahwa target PBB di Kabupaten Garut dari tahun 2018-2021 tidak tercapai. Selisih kurangnya yaitu antara 7% sampai 11% dimana persentase tertinggi ketidak tercapainya berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 11% (Data anggaran dan capaian pendapatan PBB). Pada tahun tersebut perekonomian sedang mengalami penurunan yang sangat tajam hal ini berimbas pada sektor perpajakan yang mengalami penurunan dalam realisasi penerimaannya.

Peningkatan PBB dalam penerimaannya harus didukung dengan beberapa upaya seperti dengan adanya perbaikan dan sistem yang baik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan. semakin besar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka akan semakin mendekati target yang bisa dicapai dan telah ditetapkan, hal tersebut dapat membuat efektifitas semakin besar.

Berdasarkan diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut”

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Pajak

Siahaan, sebagaimana dinyaikan dalam (2016:7) Negara (pemerintah) memungut pajak dari masyarakat menurut uu yang dapat dikenakan dan terutang oleh mereka yang wajib membayarnya tanpa menerima imbalan kinerja (counter performance/remuneration) secara langsung. Uang yang diperoleh dari pajak digunakan sebagai pengeluaran Negara untuk administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### 2.2 Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2016:9) Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan yang tidak mempunyai perimbangan langsung yang berimbang disebut sebagai pajak daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, iuran tersebut dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana dinyatakan pada tahun 2016, Siahaan:553) Biaya tanah, bangunan, dan bangunan potensial yang dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh orang atau unsur termasuk dalam biaya tanah dan bangunan, kecuali area yang digunakan untuk tanah, jasa jaga, dan kegiatan usaha pertambangan/perkotaan, permukaan bumi yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan laut disebut sebagai “bumi”. makna yang tergabung ke dalam tanah, perairan pedalaman, atau laut.

### 2.4 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2010, hlm. 14), “Efektivitas suatu organisasi adalah ukuran keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dikatakan telah beroperasi secara efisien jika mencapai tujuannya dengan sukses. Keberhasilan lahan dan membangun pendapatan pajak untuk tujuan bisnis diukur dengan seberapa efektif mereka.

#### Penilaian Efektivitas

Menurut Halim (2019,163) rumus agar dapat melihat tingkat efektivitas adalah sebagai berikut

Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$  Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Interpretasi Nilai Efektivitas

Nilai Kinerja	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91 s.d 100%	Efektif
81 s.d 90%	Cukup Efektif
60 s.d 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : *Keppmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

### 2.5 Kerangka Pemikiran

Lahirnya Undang-Undang: tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor Berdasarkan Pasal 33 UUD 2004, pemerintah kabupaten dan kota ingin meningkatkan kemampuan untuk merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan sendiri sesuai dengan potensi keuangan daerahnya .

Pajak Bumi dan Bangunan berpotensi mendatangkan uang dan berperan signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengelola dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan agar pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memperoleh manfaat dari penerimaan pajak tersebut. Karena potensinya sebagai sumber penerimaan, Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di Kabupaten Garut.

“Efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata yang dicapai,” menurut Mahmudi (2019,86). Suatu faktor yang disebut efektivitas bertujuan untuk mengukur hasil pemungutan pajak terhadap tujuan yang telah ditentukan. Mencari realisasi pendapatan pajak dan bangunan yang diperoleh dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan merupakan konsep efektivitas dengan pendapatan PBB. Cara yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan penerimaan dari target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi tersebut.

Efektivitas pendapatan pajak akan menjadi fokus kajian ini, sehingga pajak bumi dan bangunan berperan penting dalam membantu daerah dalam mendanai beasiswa.

### 3. Metode Penelitian

Sugiyono (2017:9) menyatakan teknik analisis kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivisme dan interpretatif dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam. Peneliti bertindak sebagai instrumen, data dikumpulkan melalui triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, keunikan, dan fenomena. Sugiyono mengatakan (2017:35): Tanpa membandingkan variabel itu sendiri atau mencari hubungan dengan variabel lain, variabel, pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel bebas atau disebut juga dengan variabel yang berdiri sendiri.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian karena permasalahan yang ditemukan. Selain itu mampu menentukan secara akurat efisiensi penerimaan PBB Kabupaten Garut dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. dalam perumusan masalah diperlukan dengan memberikan gambaran masalah yang sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kumpulan data penulis.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut

Tabel 4.1  
Anggaran dan Capaian pendapatan PBB di Kabupaten Garut Tahun 2018-2021

No	Tahun	Anggaran PBB (Rp) (a)	Capaian PBB (Rp) (b)	Selisih	
				Rp (c = b-a)	% (c/a*100)
1	2018	44.252.708.823	41.206.515.375	(3.046.193.448)	7%
2	2019	45.349.591.503	42.024.170.752	(3.325.420.751)	7%
3	2020	45.884.564.236	40.830.964.390	(5.053.599.846)	11%
4	2021	46.236.054.313	42.272.837.347	(3.963.216.966)	9%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut 2021

Pada tahun 2018 pendapatan realisasi PBB yaitu sebesar Rp.41.206.515.375 dari target yang ditetapkan sebesar Rp, 44.252.708.823 terdapat selisih sebesar 7%, pada tahun 2018 kecamatan yang minim dalam capaian pendapatan PBB yaitu kecamatan Tarogong Kidul dan Garut Kota dengan persentase realisasi sebesar 75%

Pada Tahun 2019 capaian pendapatan PBB yaitu sebesar Rp.42.024.170.752 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 45.349.591.503, terdapat selisih sebesar 7% pada tahun 2019 kecamatan yang rendah dalam penerimaannya masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu kecamatan Tarogong Kidul dan Garut Kota.

Pada tahun 2020 capaian pendapatan PBB yaitu sebesar Rp.40.830.964.390 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.45.884.564.236, terdapat selisih sebesar 11% kecamatan yang dalam penerimaannya mengalami penurunan diantaranya yaitu kecamatan Garut kota, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Cibiuk dan kecamatan Karangpawitan, dimana persentase dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tarogong kidul sebesar 73%, kecamatan Garut Kota sebesar 66% , kecamatan Cibiuk sebesar 77% dan kecamatan Karangpawitan sebesar 74%, pada tahun 2020 perekonomian sedang mengalami penurunan yaitu adanya wabah covid-19 yang berimbas pada sektor pajak

Pada tahun 2021 realisasi pbb yaitu sebesar Rp.42.272.837.347 dari anggaran yang disesuaikan sebesar Rp.46.236.054.313 terdapat selisih sebesar 9%, pada tahun 2021 capaian pendapatan pbb hampir di seluruh kecamatan mengalami penurunan dimana ketidaktercapaian realisasi juga disebabkan karena adanya wajib pajak yang enggan membayar dengan alasan masih dengan situasi pasca wabah covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB di Kabupaten Garut Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Target PBB (Rp) (a)	Realisasi PBB (Rp) (b)	Persentase Realisasi	Kriteria
1	2018	44.252.708.823	41.206.515.375	93%	Efektif
2	2019	45.349.591.503	42.024.170.752	93%	Efektif
3	2020	45.884.564.236	40.830.964.390	89%	Cukup Efektif
4	2021	46.236.054.313	42.272.837.347	91%	Efektif

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, diolah kembali 2021

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Garut sebesar Rp.41.206.515.375 dengan tingkat efektivitas sebesar 93% dan berada pada kriteria efektif.

Pada tahun 2019 capaian pendapatan PBB di Kabupaten Garut sebesar Rp. 42.024.170.752 sebesar 93% dari target dan berada pada kriteria efektif. Capaian pendapatan PBB dari tahun 2018 ke tahun 2019 adanya kenaikan sebesar Rp. 817.655.377 dengan persentase kenaikan sebesar 2%

Pada tahun 2020 capaian pendapatan PBB di Kabupaten Garut sebesar Rp. 40.830.964.390 sebesar 89% dari target dan berada pada kriteria cukup efektif. capaian pendapatan PBB dari tahun 2019 ke tahun 2020 penurunan terjadi sebesar Rp. 1.193.206.362 dengan persentase penurunan sebesar 3%. hal ini disebabkan karena adanya wabah covid-19 yang melanda Indonesia terutama di Kabupaten Garut yang menyebabkan ekonomi masyarakat terhenti

Pada tahun 2021 realisasi PBB di Kabupaten Garut sebesar Rp. 42.272.837.347 sebesar 91% dari target dan berada pada kriteria efektif. Realisasi pbb dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 1.441.872.957 dengan persentase kenaikan sebesar 3%, hal ini disebabkan karena perekonomian sedikit demi sedikit sudah mulai membaik

Berdasarkan temuan analisis yang dilakukan, kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi penyebab gagalnya pemungutan PBB. Hal ini terkait dengan pemahaman atau pengetahuan wajib pajak yang masih relatif rendah khususnya di Kabupaten Garut yang

menyebabkan wajib pajak tidak dapat membayar kewajibannya. Selain itu kesalahan penyampaian oleh petugas akibat kesalahan input data yang tidak sesuai dengan lapangan juga mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut yang menyebabkan Wajib Pajak

#### 4.2 Hambatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan pemahaman tentang cara membayar pajak bumi dan bangunan. Kabupaten Garut terus menarik banyak pengunjung untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena jangkauan geografisnya yang luas dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak..
2. terdapat ketidaksesuaian data pasal dan subyek pajak, karena ketidaksesuaian pengisian dan pemeriksaan data pasal dan subyek PBB , pemeriksaan keterangan barang dan subyek pajak yang terutang. tidak sesuai dengan pemeriksaan sektoral karena ketidakjelasan data topik dan objek pajak bumi dan bangunan.
3. Kurangnya sanksi yang tegas oleh Badan Pendapatan daerah dalam pemungutan PBB sehingga WP mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak.
4. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah mengalami kesulitan untuk penerimaan PBB karena pada tahun tersebut Indonesia khususnya Kabupaten Garut sedang dilanda wabah covid-19 sehingga untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut tahun 2020 realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena pada tahun tersebut perekonomian sedang mengalami penurunan

#### 4.3 Upaya Mengatasi Hambatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut

1. Melakukan penyuluhan dan kursus terhadap warga luas tentang pentingnya melaksanakan komitmen membayar retribusi tanah dan bangunan, mengatasi hambatan-hambatan yang terkait dengan kesadaran warga terkait dengan informasi dan pemahaman warga tentang pentingnya membayar retribusi daerah dan bangunan,
2. Mengatasi ketidakjelasan Objek pajak, subjek pajak dan keterlambatan SPPT maka dari itu Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan secara berkala dan memeriksa kembali objek pajak dan subjek pajak sesuai dengan data yang ada di lapangan dengan cara mendaftarkan objek pajak yang baru yang belum terdaftar lalu membenahi manajemen penagihan pajak bumi dan bangunan
3. Mengeluarkan sanksi sosial kepada wajib pajak yang tidak taat jika telah diberikan denda masih tetap tidak membayar yaitu berupa penempelan stiker pada objek pajak bahwa pemiliknya tidak mematuhi aturan dalam membayar pajak. Selain itu jika objek pajak sudah mutasi ke wajib pajak yang lain maka wajib pajak tersebut harus membayar pajaknya tersebut
4. Pada tahun 2020 bapenda memberikan upaya dalam bentuk relaksasi dimana jika wajib pajak yang membayar pajak terutangnya di tahun 2020 maka yang dibayarkan hanya pajak terutang pada tahun 2020 saja , tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak jika dilihat dari realisasi pada tahun 2020 masih tidak tercapai. Selanjutnya pada saat tahun 2021 bapenda memberikan relaksasi kembali dimana jika wajib pajak membayar pajak terutang dari tahun sebelumnya di tahun 2021 maka wajib pajak tersebut bebas dari sanksi denda yang telah ditetapkan

#### 4.4 Faktor Eksternal,Internal dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Analisis SWOT



#### 4.4.1 Faktor Eksternal

Tabel 4.3  
Riset faktor luar pendapatan Pajak Bumi dan Bagunan di Kabupaten Garut

NO		NILAI	RATING	SKOR
<b>A.</b>	<b>PELUANG</b>			
1	dalam membayar pajak masyarakat semakin tinggi akan kesadarannya	0.25	3	0.75
2	teknologi informasi dan komunikasi merupakan kemajuan bagi pbb	0.35	4	1,4
3	peningkatan peluang pendapatan sebagai hasil dari peningkatan infrastruktur	0.30	4	1.2
<b>TOTAL PELUANG</b>				3.35
NO		NILAI	RATING	SKOR
<b>B</b>	<b>ANCAMAN</b>			
1	WP enggan membayar PBB	0.20	4	0,8
2	Adanya WP yang tidak mendaftarkan objeknya	0.30	3	0.9
3	Terjadinya virus corona yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan	0.35	4	1,4
<b>TOTAL ANCAMAN</b>				3,1
<b>PELUANG DIKURANGI ANCAMAN</b>				0.25

Jika hasil perhitungan peluang (3.35) versus ancaman (3.1) bernilai positif, maka peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut saat ini dapat mengurangi ancaman tersebut, seperti terlihat pada tabel 4.2 di atas.

#### 4.4.2 Faktor Internal

Tabel 4.4  
Analisis Faktor Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan di Kabupaten Garut

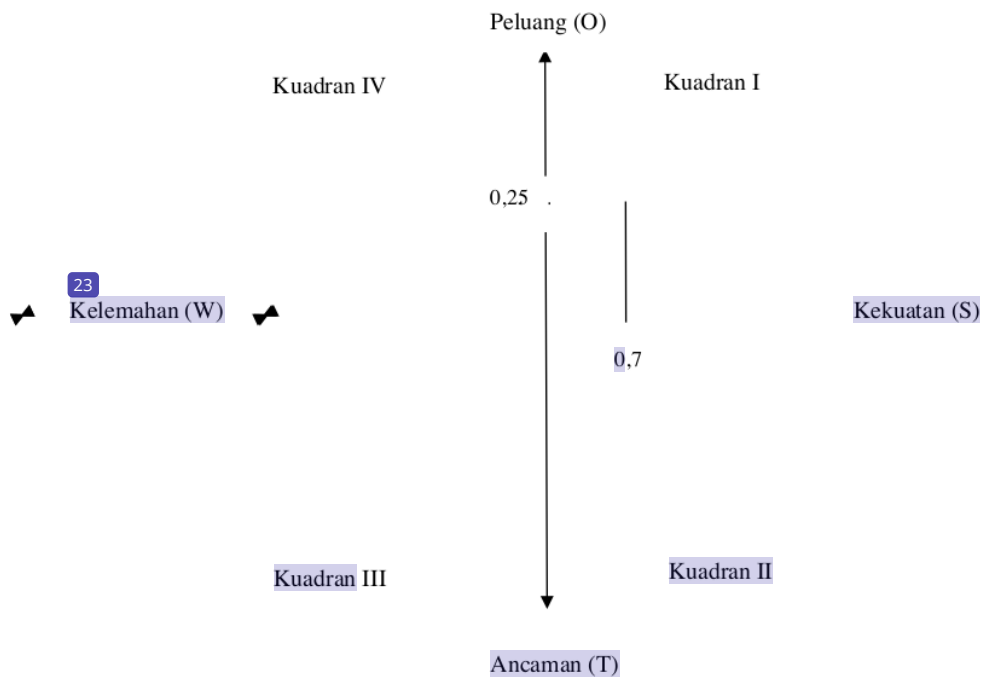
NO		NILAI	RATING	SKOR
<b>A.</b>	<b>KEKUATAN</b>			
1	Adanya sarana sebagai fungsi pelayanan	0.25	4	1
2	Terdapat payung hukum yang mengatur penerimaan pajak bumi dan bangunan	0.25	3	0.75
3	Semakin meningkatnya fungsi pelayanan	0.35	3	1.05
<b>TOTAL KEKUATAN</b>				2,8
NO		NILAI	RATING	SKOR
<b>B</b>	<b>KELEMAHAN</b>			

1	Kurangnya SDM untuk membantu penyuluhan atau sosialisasi	0.25	3	0.75
2	Belum diberlakukannya sanksi yang tegas kepada wajib pajak	0.15	3	0.45
3	Kurangnya tenaga lapangan pendataan	0.30	3	0.9
<b>TOTAL KELEMAHAN</b>				2,1
<b>KEKUATAN DIKURANGI KELEMAHAN</b>				0,7

Peneliti dapat menyimpulkan dari tabel 4.3 sebelumnya bahwa hasil akhir perhitungan antara kekuatan (2.8) dan kelemahan (2.1) adalah (0.7), menunjukkan bahwa kekuatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut saat ini dapat mengatasi kelemahan mereka.

#### 4.4.3 Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Analisis SWOT

Analisis faktor luar) mendapat skor 0,25, sedangkan analisis faktor dalam (kekuatan vs kelemahan) mendapat skor 0,7 berdasarkan perhitungan di atas- Berikut ini adalah gambaran letak kuadran tersebut:



**Gambar 4.1** Peta Kuadran Analisis SWOT Faktor Eksternal dan Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut

Peta kuadran analisis SWOT di atas mengungkapkan bahwa faktor eksternal penghasil nilai positif 0,25 berada pada posisi peluang, dan faktor internal penghasil nilai positif 0,7 berada pada posisi kekuatan, menempatkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada posisi yang kuat. posisi kekuasaan yang besar dan memanfaatkan peluang yang ada saat ini untuk pendapatan PBB di Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait/ahli pakar penerimaan PBB tersebut merumuskan strategi yang harus digunakan oleh Bapenda yaitu strategi SO yang dilihat dari hasil kuadran diatas. Adapun strategi yang telah dirumuskan agar Bapenda dapat meningkatkan penerimaan PBB yaitu sebagai berikut:

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam penerimaan PBB .Dengan kemajuan teknologi pada saat ini yang sudah berkembang dengan pesat dapat memudahkan dalam segala akses khususnya dalam realisasi pbb maka dari itu Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkannya karena tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui adanya program berbasis internet dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi atau informasi lewat media sosial yang ada.
2. meningkatkan pendapatan penerimaan PBB
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Bapenda Kabupaten Garut agar fungsi pelayanan meningkat. hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pelatihan atau seminar yang diberikan kepada aparatur Bapenda Kabupaten Garut, agar aparatur Bapenda dapat lebih meningkatkan kemampuan serta pemahamannya.

26

## 5. Simpulan dan Saran

### 5.1 Simpulan

1. Tingkat efektivitas di Kabupaten Garut pada tahun 2018 dan tahun 2019 kriterianya berada pada kategori efektif, pada tahun 2020 kriterianya berada pada kategori cukup efektif dan pada tahun 2021 kriterianya berada pada kategori efektif.
2. Hambatan dalam penerimaan PBB di Kabupaten Garut yaitu karena masih banyak wajib pajak yang tidak memperhatikan kewajibannya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, adanya ketidaksesuaian data objek dan subjek wajib pajak dan adanya keterlambatan penyampaian SPPT, kurangnya sanksi yang tegas yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah(BAPENDA), dan yang terakhir pada tahun 2020 adanya wabah covid-19 yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Garut.
3. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Garut untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan seminar kepada masyarakat, melakukan pendataan secara berkala dan memeriksa kembali objek pajak dan subjek pajak yang belum terdaftar, adanya sanksi sosial yaitu berupa penempelan stiker pada objek pajak bahwa pemiliknya tidak mematuhi aturan dalam membayar pajak, adanya relaksasi yang diberikan bapenda kepada wajib pajak,
4. Faktor eksternal terdiri dari:
  - A. Peluang, seperti peningkatan kesadaran wajib pajak, ketersediaan kemajuan informasi dan komunikasi yang mendukung, dan peningkatan sumber pendapatan dengan pembangunan infrastruktur
  - B. Ancaman yaitu sebagian wajib pajak menghindari untuk membayar pajak, masyarakat belum mendaftarkan objek pajaknya, adanya wabah covid-19.Faktor internal terdiri dari:
  - A. Kekuatan yaitu adanya fasilitas yang memungkinkan, SDM yang mencukupi, memiliki hukum pusat dan daerah, fungsi pelayanan yang semakin meningkat.

B. Kelemahan terbatasnya SDM untuk membantu melakukan penyuluhan atau sosialisasi, belum diberlakukannya sanksi yang tegas kepada wajib pajak, kurangnya tenaga lapangan pendataan.

Berdasarkan Faktor Eksternal dan internal di atas maka strateginya sebagai berikut:

- a. mengandalkan teknologi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- b. Optimalisasi penerimaan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Bapenda Kabupaten Garut

## 5.2 Saran

1. Diperkirakan bahwa Badan Pendapatan Regional Garut Regency akan dapat melakukan lebih banyak sosialisasi rutin masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami bahwa itu untuk membayar pajak untuk menghidupkan kembali pembangunan di Kabupaten Garut. Akibatnya, diantisipasi bahwa pembayar pajak akan lebih cenderung mematuhi pajak properti.
2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan tidak berfokus pada satu topik tetapi dapat meneliti topik yang lebih luas seperti berbagai komponen pajak daerah lainnya selain itu juga diharapkan dapat memperluas analisis SWOT untuk menganalisis faktor eksternal dan internal apa saja dalam penerimaan PBB dengan menambah permasalahan yang sedang terjadi di tahun selanjutnya agar dapat dijadikan pembandingan dan menjadi penelitian yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2019). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi)*. Raja Grafindo Persada.

J24022118050

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

adoc.pub

Internet Source

2%

2

123dok.com

Internet Source

1%

3

repositori.usu.ac.id

Internet Source

1%

4

journals.usm.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.uty.ac.id

Internet Source

1%

6

eprints.perbanas.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

8

id.123dok.com

Internet Source

1%

9

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1%

10	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Kodoati N. Christi, Treesje Runtu, Stanley Kho Walandouw. "ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN SESUDAH DIALIHKAN MENJADI PAJAK DAERAH (Studi Kasus di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	1 %
12	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://eprints.uwp.ac.id">eprints.uwp.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
16	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
17	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

18	Unggul Sugiharto, Lina Meliawati Putri. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupate Brebes", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2019 Publication	<1 %
19	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
21	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
23	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
26	eprints.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
27	kumpulantugasdanmakalah.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

28

[pt.scribd.com](https://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

29

[www.scribd.com](https://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

30

[ap.fip.um.ac.id](https://ap.fip.um.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[digilibadmin.unismuh.ac.id](https://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[enbolas.net](https://enbolas.net)

Internet Source

<1 %

33

[garuda.ristekdikti.go.id](https://garuda.ristekdikti.go.id)

Internet Source

<1 %

34

[hukum.studentjournal.ub.ac.id](https://hukum.studentjournal.ub.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

36

[jurmafis.untan.ac.id](https://jurmafis.untan.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

[repo.iain-tulungagung.ac.id](https://repo.iain-tulungagung.ac.id)

Internet Source

<1 %

38

[sergu07.blogspot.com](https://sergu07.blogspot.com)

Internet Source

<1 %



39 [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) <1 %  
Internet Source

---

40 [www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id](http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

41 Faizatun Nisa, Muhammad Arif. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020)", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022 <1 %  
Publication

---

42 [perpajakan.ddtc.co.id](http://perpajakan.ddtc.co.id) <1 %  
Internet Source

---

43 Ade Irvi Nurul Husna, Arman Paramansyah. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah pada Pembiayaan yang Disalurkan (Libraryresearch)", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2020 <1 %  
Publication

---

44 [zombiedoc.com](http://zombiedoc.com) <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off